

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan aktivitas-aktivitas yang terorganisir yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat mencapai keberfungsian sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang sejahtera dari individu-individu, dimana individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembahasan konsep kesejahteraan ini meliputi: pengertian kesejahteraan sosial, tujuan kesejahteraan sosial, fungsi kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting yang harus diwujudkan oleh suatu negara, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tidaklah mudah karena terdapat berbagai masalah-masalah sosial yang menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial.

Masalah sosial merupakan hal yang tidak diharapkan semua orang untuk terjadi. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kelompok sosial, sehingga dapat menghambat keinginan-keinginan pokok kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan (Soekanto, 2014 : 312).

Masalah sosial menghambat kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan merujuk pada keadaan yang sejahtera yang dirasakan oleh individu atau kelompok,

yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang dan papan. Berikut ini merupakan pengertian dari kesejahteraan sosial:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Friedlander, dalam Fahrudin, 2018 : 9).

Kesejahteraan sosial merupakan suatu pelayanan sosial dengan tujuan membantu individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan dapat mengembangkan kemampuannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, dalam Fahrudin, 2018 : 10).

Kesejahteraan sosial tidak hanya merujuk pada keadaan terpenuhinya kebutuhan secara material, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual dan sosial. Kebutuhan material, spiritual dan sosial harus terpenuhi agar mencapai kesejahteraan sosial, dengan demikian individu-individu dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menjadi harapan masyarakat untuk merasakan keadaan yang sejahtera sehingga individu atau kelompok dapat menjalankan fungsi

sosialnya dengan baik. Kesejahteraan sosial memiliki tujuan, berikut merupakan tujuan kesejahteraan sosial:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2018 : 10).

2.1.3 Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk mengurangi tekanan-tekanan yang juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang meliputi:

- 1) Fungsi Pencegahan (*preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- 2) Fungsi Penyembuhan (*curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
- 3) Fungsi pengembangan (*development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- 4) Fungsi penunjang (*supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial (Fahrudin, 2018 : 12-13).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial ini membantu individu-individu untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan tekanan-tekanan yang terjadi akibat perubahan sosio-ekonomi, dengan melaksanakan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosial individu-individu sebagaimana tujuan dari kesejahteraan sosial.

2.1.4 Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan sosial. Pelayanan-pelayanan sosial dapat berupa program kesejahteraan sosial sebagai upaya menolong dan mencapai suatu kondisi yang sejahtera untuk individu-individu yang rentan dan membutuhkan pelayanan sosial. Berikut ini merupakan pengertian dari usaha kesejahteraan sosial:

Sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan (Friedlander, dalam Fahrudin, 2018 : 15).

Upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009, dalam Fahrudin, 2018 : 15-16).

Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya yang terarah dan berkelanjutan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perlindungan individu-individu dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang dilakukan secara profesional guna membantu individu atau kelompok untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya. Pekerjaan sosial ini dilakukan oleh seorang pekerja sosial, yang merupakan seorang lulusan dari jurusan Kesejahteraan Sosial, yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial secara profesional. Pada pembahasan konsep pekerjaan sosial ini, meliputi: pengertian pekerjaan sosial, tujuan pekerjaan sosial, prinsip dasar pekerjaan sosial, keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial, dan peran pekerja sosial.

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan peranannya (Suharto, 2014 : 149). Pekerjaan sosial membantu individu-individu untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial (Siporin, dalam Fahrudin, 2018 : 61).

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang membantu individu atau kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial dengan membantu memberikan solusi alternatif dari permasalahan tersebut. Pertolongan dalam

pekerjaan sosial bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu maupun kelompok.

Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial (Dubois & Miley, dalam Fahrudin, 2018 : 61-62).

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang dapat meningkatkan perubahan sosial dan memecahkan masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam pekerjaan sosial yang dilaksanakan tidak terlepas dari prinsip-prinsip pekerjaan sosial dalam proses pertolongannya.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan secara profesional untuk membantu individu-individu atau kelompok, pekerjaan sosial juga memiliki tujuan-tujuan sebagai profesi pertolongan. Tujuan-tujuan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
- 2) Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan
- 3) Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan
- 4) Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial
- 5) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- 6) Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan Tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- 7) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan ketrampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.

- 8) Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam (Fahrudin, 2018 : 66-67).

2.2.3 Prinsip Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melaksanakan proses pertolongan, memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pekerjaan sosial yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial yakni meliputi prinsip:

- 1) Penerimaan (*Acceptance*)
Pekerja sosial dituntut dapat menerima klien apa adanya. Prinsip penerimaan adalah pintu masuk untuk mendalami kehidupan klien, dengan prinsip tersebut, maka relasi akan dikembangkan lebih baik antara klien dan pekerja sosial.
- 2) Komunikasi (*Communication*)
Komunikasi akan terbangun jika ada kontak dengan klien. Komunikasi verbal dan nonverbal yang disampaikan sama-sama akan memengaruhi kualitas hubungan yang dibangun dengan klien.
- 3) Individualisasi (*Individualitation*)
Setiap kita unik, artinya memiliki perbedaan nilai dan pandangan. Begitu pula dengan klien. Tiap klien memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi.
- 4) Partisipasi (*Participation*)
Peran serta klien dan keluarganya sangat lebih penting. Pekerja sosial hanya membantu menolong klien untuk mereka dapat menolong diri mereka sendiri.
- 5) Kerahasiaan (*Confidentiality*)
Pekerja sosial harus bisa membedakan hal rahasia dan tidak rahasia, sehingga bisa mengetahui kerahasiaan kasus yang sedang ditangani.
- 6) Kesadaran Diri Petugas (*Worker Self Awarness*)
Pekerja sosial memiliki nilai, pengetahuan, dan keterampilan sehingga penanganan yang dilakukan harus lebih profesional, diantaranya mampu mengendalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan dan masalah klien (Midgley dalam Pekei, 2019 : 28-30).

2.2.4 Keterampilan-keterampilan Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial memiliki keterampilan-keterampilan yang penting bagi pelaksanaan pekerjaan sosial atau dalam proses pertolongan individu atau

kelompok. Beberapa keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Keterampilan dalam mendengarkan orang lain dengan pengertian dan tujuan.
- 2) Keterampilan dalam mendapatkan informasi dan dalam mengumpulkan fakta yang relevan untuk mempersiapkan riwayat sosial, asesmen (penilaian), dan laporan.
- 3) Keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pertolongan profesional dan dalam menggunakan diri sendiri dalam hubungan.
- 4) Keterampilan dalam mengamati dan menafsirkan perilaku verbal dan nonverbal dan dalam menggunakan pengetahuan tentang teori kepribadian dan metode-metode diagnostik.
- 5) Keterampilan dalam menyertakan klien dalam usaha untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan dalam memperoleh kepercayaan.
- 6) Keterampilan dalam mendiskusikan masalah-masalah emosional yang sensitif dalam cara yang mendukung dan tidak mengancam.
- 7) Keterampilan dalam menciptakan solusi inovatif atas kebutuhan-kebutuhan klien.
- 8) Keterampilan dalam menentukan kebutuhan untuk mengakhiri hubungan terapeutik dan bagaimana melakukannya.
- 9) Keterampilan dalam menafsirkan temuan-temuan penelitian dan literatur profesional.
- 10) Keterampilan dalam memediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang saling konflik.
- 11) Keterampilan dalam menyediakan pelayanan penghubung antarorganisasi.
- 12) Keterampilan dalam menafsirkan atau mengomunikasikan kebutuhan-kebutuhan sosial kepada sumber-sumber pemberi dana, publik, atau para legislator (Fahrudin, 2018 : 73).

2.2.3 Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan sosial yang membantu individu atau kelompok untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya, sehingga mereka dapat menolong dirinya sendiri. Pekerjaan sosial tentunya berkaitan dengan seorang pekerja sosial.

Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk

melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial (Pekei, 2019 : 27).

Pekerja sosial memiliki beberapa peran dalam melaksanakan pekerjaan sosial. Peran-peran seorang pekerja sosial sangatlah penting untuk membantu individu atau kelompok memecahkan permasalahannya. Berikut ini merupakan peran-peran pekerja sosial yang meliputi:

1) *Enabler*

Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan sosialnya; agar masyarakat mampu mengidentifikasi masalah sosialnya yang sedang dihadapi; serta agar masyarakat mampu mengembangkan kapasitas dirinya.

2) *Broker*

Broker atau perantara adalah upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat.

3) *Educator*

Peran *educator* atau pendidik, pekerja sosial memiliki fungsi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada klien melalui bimbingan-bimbingan sebagai upaya pencegahan, penyembuhan, penguatan dan pengembangan.

4) *Expert*

Peran *expert* atau tenaga ahli, seorang pekerja sosial memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai situasi.

5) *Social Planner*

Memfokuskan pada tugas yang terkait yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program, mengumpulkan banyak data mengenai masalah sosial, menganalisis dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam menangani berbagai masalah tersebut.

6) *Advokat*

Membantu klien dalam memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan, sumber daya, perlindungan dan pendampingan dalam kasus pelanggaran hukum.

7) *Aktivis*

Peran selaku pembela yang mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah mengalihkan sumber daya atau kekuatan pada kelompok kurang beruntung (Iskandar, 2019 : 19-21).

Pekerja sosial juga berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi klien, memberikan dorongan semangat atau membangkitkan semangat klien (Rustanto,

2015 : 23). Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Peran fasilitator yakni memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial (Andari, 2020).

2.3 Konsep Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial ditandai jika seseorang dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dalam kehidupan di masyarakatnya. Individu atau kelompok yang tidak berfungsi secara sosialnya disebabkan karena masalah sosial yang tidak dapat dipecahkan sehingga mengganggu fungsi sosialnya.

Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasinya oleh individu (Barlett, dalam Fahrudin, 2018 : 62).

Keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas-seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan yang, karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, setiap orang diminta untuk melakukannya (Siporin, dalam Fahrudin, 2018 : 62-63).

Individu harus berfungsi secara sosial untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan serta memenuhi kebutuhannya. proses pertolongan merupakan hal yang penting untuk keberfungsian sosial seseorang, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai keberfungsian sosial:

Keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya (Suharto, 2014 : 146).

Keberfungsian sosial dapat disimpulkan sebagai kemampuan mengatasi tuntutan di lingkungannya dengan menunjukkan keseimbangan antara individu dengan individu lainnya dalam lingkungan bermasyarakat. Setiap individu menduduki status sosial sekaligus peranan dalam kehidupannya, peranan-peranan sosial tersebut menunjukkan keberfungsian sosial dari individu atau masyarakat.

2.4 Konsep Kemandirian dan Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ditandai dengan tidak bergantungnya sesuatu terhadap orang lain termasuk tidak bergantungnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Individu yang mandiri adalah individu yang tidak bergantung kepada orang lain atas hidupnya dan dapat secara mandiri berdiri diatas kaki sendiri.

Istilah “kemandirian” menunjukkan adanya kepercayaan akan kemampuan diri untuk menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari orang lain dan keengganan untuk dikontrol orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat berdiri sendiri, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan di mana ia berada (Nurhayati, 2011 : 131).

Kemandirian merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain, juga bebas dalam bertindak, tidak bergantung pada kemampuan orang lain dan dapat mengambil keputusan tanpa terpengaruh pada lingkungan, bertindak percaya diri dan tanggung jawab, memiliki kemampuan untuk mengatasi

hambatan-hambatan serta dapat melakukan sesuatu secara tepat tanpa menggantungkan kepada orang lain.

Ekonomi secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya (Dinar & Hasan, 2019 : 1-2).

Ekonomi merupakan pengaturan rumah tangga. Ilmu ekonomi sangat penting dalam kehidupan karena dalam ilmu ekonomi mencakup cara pengelolaan rumah tangga sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu-individu dalam kehidupannya.

Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama, dalam usaha memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah keadaan dimana semua kebutuhan kebendaan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya (Dinar & Hasan, 2019 : 2).

Kemandirian ekonomi ditandai dengan kemampuan seseorang yang tidak bergantung terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pribadinya dalam kehidupan termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau masyarakat.

Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain (Havighurst, dalam Desmita, 2011 : 186). Kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh setiap individu sangatlah penting, karena kemampuan yang mandiri dalam hal perekonomian dapat membantu individu bebas dari ketergantungan terhadap orang lain, terutama untuk menyelesaikan permasalahannya serta kebutuhan ekonominya.

2.5 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Kemiskinan berdampak pada semua aspek, salah satunya perekonomian dan sosial. Dalam aspek ekonomi, berdampak pada penghasilan yang kurang yang akan mempengaruhi kehidupan sosialnya, salah satunya ketidakberdayaan karena keadaan yang serba kekurangan akibat dari kemiskinan.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. (Suharto, 2014 : 134). Kemiskinan dalam segi ekonomi termasuk mengenai penghasilan atau pendapatan seseorang.

Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya (Qaradhawi, 2005 : 21).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai lemahnya sumber penghasilan yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, sehingga karena lemahnya sumber penghasilan individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sebagaimana mestinya dan inilah yang menyebabkan mereka tidak berdaya.

Kemiskinan sangatlah berdampak pada segala aspek dalam kehidupan individu terutama dari segi ekonomi dan kehidupan sosial mereka. Kemiskinan memiliki ciri dalam hal dimensi ekonomi dan sosial. Berikut merupakan ciri-ciri kemiskinan:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).

- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- 4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
- 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- 6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- 8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- 9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (Suharto, 2014 : 132).

Kemiskinan sangat berpengaruh dalam kehidupan individu, kemiskinan yang ditandai dengan lemahnya sumber penghasilan mempengaruhi keberfungsian sosial individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok atau pun kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

2.6 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberfungsian sosial, juga berpengaruh terhadap kemampuan seseorang agar dapat berdaya guna yang nantinya kemampuan yang dihasilkan dari pemberdayaan tersebut dapat dimanfaatkan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan dapat berupa program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu atau masyarakat.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2014 : 58).

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, antarpribadi, atau politik, sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi-situasi mereka (Gutierrez, dalam Fahrudin, 2018 : 67-68).

Pemberdayaan sangatlah dibutuhkan, khususnya untuk kelompok yang rentan dan lemah dikarenakan melalui pemberdayaan, kelompok atau individu dapat diberdayakan sehingga dapat mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam mencapai sumber-sumber yang mereka perlukan dan bebas dari ketidakberdayaan.

Proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap individu atau kelompok ditandai melalui beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Memusatkan pada kekuatan-kekuatan. Menekankan kekuatan dan kemampuan yang ada pada klien lebih dapat mendorong mereka untuk melakukan perubahan atas situasinya ketimbang mengemukakan masalah dan kekurangan-kekurangannya.
- 2) Bekerja secara kolaboratif. Ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam pekerjaan sosial, yaitu partisipasi. Klien harus terlibat secara integral dalam proses perubahan, mulai dari merumuskan situasi mereka sampai penentuan tujuan, memilih rangkaian tindakan, dan mengevaluasi hasilnya.
- 3) Secara kritis memikirkan tentang pengaturan struktural. Pemikiran kritis mempertanyakan pengaturan struktural yang ada, distribusi kekuatan dan kewenangan, dan akses pada sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 4) Menghubungkan kekuatan pribadi dan kekuatan politis. Kekuatan pribadi meliputi kemampuan individu untuk mengontrol kehidupannya dan memengaruhi lingkungannya. Kekuatan politis adalah kemampuan untuk mengubah sistem, mendistribusikan kembali sumber-sumber, membuka struktur kesempatan, dan mengorganisasi kembali masyarakat (DuBois & Miley, dalam Fahrudin, 2018 : 69-70).

Individu atau kelompok dapat dikatakan berdaya atau tidaknya dapat diketahui melalui indikator keberdayaan. Berikut ini merupakan tabel indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan apakah individu tersebut berdaya ataukah tidak berdaya.

Tabel 2.1 Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya. • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara. • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assertiveness</i> dan otonomi Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan keuangan mikro • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, termasuk kemelekan hurup • Status kesehatan dan gizi • Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan • Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan
Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. • Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya. • Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga. • Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana. • Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat • Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada ,ingkat rumah tangga,	<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern. • Mampu memberi gaji terhadap orang lain • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga. • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
masyarakat dan makro	diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro.		<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro

Sumber: (Suharto, 2014)

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari indikator keberdayaan tabel diatas. Pemberdayaan masyarakat dalam arti sempit, seperti pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomis produktif dan program bantuan-bantuan sosial langsung lainnya (Suharto, 2014 : 107).

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui program-program berbasis pemberdayaan yang dapat membantu individu atau kelompok dalam meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber yang mereka perlukan. Pemberdayaan pula sangat beragam, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan merupakan penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik berdasarkan keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku. Salah satu tujuan pemberdayaan perempuan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan keamanan guna kemandirian (Rini, 2019 : 11-12).

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perempuan guna mencapai kemandirian perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan diukur dari beberapa dimensi, berikut ini merupakan lima dimensi pemberdayaan perempuan yang harus diperhatikan meliputi:

- 1) Dimensi kesejahteraan dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan,

perumahan dan sebagainya. Perempuan desa yang terpenuhi kebutuhan makanan, kesehatan dan perumahan secara layak dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan. Sebaliknya apabila belum terpenuhi kebutuhan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera.

- 2) Dimensi akses atas sumberdaya dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya. Perempuan memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha untuk memproduksi barang atau jasa serta mendapatkan informasi untuk mengembangkan usahanya serta mengasah keterampilan maupun bakat yang dimiliki.
- 3) Dimensi kesadaran atau kesadaran kritis untuk mengetahui ada tidaknya upaya kesadaran terhadap adanya kesenjangan gender yang disebabkan faktor sosial budaya yang sifatnya dapat diubah. Upaya kesadaran tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat umum maupun perempuan desa yang memiliki pemahaman kritis terhadap konsep gender. Sehingga faktor sosial budaya yang menghambat dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Kesadaran kritis tentang gender perlu dibangun secara berkelanjutan.
- 4) Dimensi partisipasi yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga yang terkesan elite. Perempuan desa harus ada yang duduk di lembaga elit pemerintahan desa. Sehingga dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan desa.
- 5) Dimensi kontrol untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan. Dimensi kontrol ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat umum maupun perempuan untuk memastikan kepentingan perempuan terwadahi di segala bidang kehidupan (Rini, 2019 : 39-40).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya individu atau kelompok yang rentan dan lemah untuk bisa mengakses sumber-sumber yang mereka perlukan sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Begitupun dengan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas perempuan yang juga diharapkan dapat terwujud peningkatan ekonomi keluarga yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.7 Tinjauan Mengenai *Bank Emok*

Permasalahan sosial yang masih dialami oleh sebagian masyarakat adalah dalam hal perekonomian karena memiliki penghasilan yang sangat kurang,

sehingga mereka mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan meminjam uang kepada *Bank Emok*. *Bank Emok* adalah seseorang atau sekelompok orang yang meminjamkan uang, intinya cukup mudah meminjam uang melalui Bank Emok, hanya saja proses pembayarannya cukup memberatkan karena bunga dari pinjaman tersebut cukup besar. Sasaran *Bank Emok* adalah ibu-ibu yang memiliki penghasilan yang kurang dan membutuhkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. *Bank Emok* tidak memiliki regulasi yang jelas dan tidak ada jaminan apapun dalam peminjaman uang. *Bank Emok* merupakan istilah yang digunakan masyarakat sebagai sebutan kepada pinjaman manapun dengan sistem kelompok dengan cara perkumpulan kelompok di rumah-rumah pada setiap pertemuan dalam membayar angsuran dan pencairan.

Istilah *Bank Emok* terkenal karena dalam Bahasa Sunda yang dimana para peminjam uang terdiri dari ibu-ibu yang duduk (*emok*) diatas lantai, dengan konsep penagihannya bukan secara perorangan melainkan secara berkelompok. Model *Bank Emok* dalam prakteknya pencairan pinjamannya mudah, namun pengembaliannya lebih tinggi. Pemilihan konsep pinjaman kelompok, dikarenakan masyarakat khususnya ibu-ibu memiliki ikatan emosional, dan memiliki sanksi sosial lebih berat dari sanksi lainnya. Konsep ini memiliki tingkat risiko yang sangat kecil untuk *Bank Emok* karena setiap anggota kelompok saling mengingatkan satu sama lain untuk membayar angsuran. Ketika salah satu anggota tidak bisa membayar maka, anggota lainnya harus tanggung jawab melakukan patungan untuk anggota yang tidak bisa membayar tersebut (Ruswandi & Zaelani, 2021).

Perempuan khususnya ibu-ibu yang melakukan pinjaman kepada *Bank Emok* dikarenakan mereka terdesak dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. *Bank Emok* ini memberikan pinjaman dengan mudah tanpa ada syarat-syarat yang sulit dalam prosesnya, tetapi untuk pengembaliannya sangat memberatkan karena menetapkan bunga sangat tinggi.

Beberapa korban dari *Bank Emok* ini sangat kesulitan untuk membayar, karena *Bank Emok* ini merupakan pinjaman ilegal sehingga menetapkan bunga yang sangat tinggi, akibatnya hutang pinjaman tersebut semakin tinggi dan membuat para korbannya tidak berdaya untuk melunasinya dikarenakan penghasilan mereka yang sangat kurang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun sulit dan harus ditambah dengan beban melunasi pinjaman yang semakin tinggi karena terjerat dengan *Bank Emok*.

2.8 Tinjauan Mengenai Sekoper Cinta

Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) merupakan sekolah perempuan, dimana sekolah ini lebih menekankan pada perubahan paradigma pola pikir perempuan agar menjadi mandiri berdaya guna dan berhasil guna. Sekoper Cinta ini merupakan sekolah pendidikan non-formal yang berfokus pada pemberdayaan perempuan.

DP3AKB Jawa Barat memiliki program dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Jawa Barat. Salah satu programnya adalah Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), program pemberdayaan perempuan menjadi strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan di Jawa Barat dilihat dari tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya

tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Sekoper Cinta diharapkan mampu mengatasi permasalahan sosial yang disebabkan oleh kerentanan keluarga seperti tingginya kasus perceraian, prevalensi stunting, dan perkawinan usia anak (Allamanda, Amalia, & Palapah, 2020).

Sekoper Cinta merupakan wadah perempuan Jawa Barat untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai upaya mewujudkan perempuan juara yang mampu memberdayakan diri, keluarga dan lingkungan sekitar.

Sekoper Cinta memiliki program yang sasarannya membidik kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, control dan manfaat. Peserta Sekoper Cinta dimulai dari rentang usia 18 tahun sampai lanjut usia yang memiliki kemauan untuk mengikuti Sekoper Cinta.

Program Sekoper Cinta disusun berdasarkan beberapa tahapan atau sektor, meliputi: pembentukan pedoman program, pembuatan modul pemberlajaran umum dan modul tematik, *training of trainer* untuk fasilitator, *training of trainer* untuk relawan, pelaksanaan perempuan di 27 Kabupaten dan Kota, serta monitoring dan evaluasi.

Program Sekoper Cinta merupakan program pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan-perempuan di Provinsi Jawa Barat agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Program

Sekoper Cinta ini memiliki tujuan, berikut ini adalah tujuan dari Program Sekoper Cinta:

- 1) Memiliki pengetahuan terkait kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Memiliki pengetahuan dan menerapkan keterampilan terkait relasi keluarga serta etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait kesehatan keluarga.
- 4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Memiliki pengetahuan dan dapat menerapkan keterampilan dasar perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis dan mengemukakan pendapat.

Sekoper Cinta memiliki materi pembelajaran yang disampaikan dan diajarkan kepada peserta Sekoper Cinta, materi yang diberikan merupakan materi yang jika diklasifikasikan meliputi: materi tentang diri, rumah tangga, lingkungan, pengembangan usaha, sebagai berikut:

- 1) Pertama, materi tentang diri ialah seperti penggalian potensi diri, manajemen konflik dan stress.
- 2) Kedua, materi tentang rumah tangga terbagi atas pemenuhan dan pengelolaan sandang pangan keluarga, pola asuh anak dan remaja, simulasi masalah keluarga, pemeliharaan rumah dan pekarangan, kesehatan reproduksi dan pengenalan penyakit, praktek makanan sehat berdasarkan konsep gizi seimbang, pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga.

- 3) Ketiga, materi tentang lingkungan yang terdiri atas bank sampah, pengelolaan sampah dan air kotor, simulasi penanganan bencana, jamkesda, BPJS.
- 4) Keempat, materi tentang pengembangan usaha seperti identifikasi potensi ekonomi di Rumah Tangga dan lingkungan sekitar, pengelolaan sumber pendanaan, manajemen pemasaran produk rumah tangga, dan pengelolaan keuangan usaha rumah tangga (Sofiana Eri, 2020).

Model sekolah perempuan ini ialah sekolah non formal yang terbagi menjadi tiga tahapan. Pertama, meningkatkan pengetahuan dengan metode ceramah, membaca, menonton, tanya jawab, dan lain sebagainya. Kedua, merubah sikap dari tidak mau menjadi mau dengan metode diskusi dan berbagi, melihat contoh, bermain peran, dan refleksi. Ketiga, meningkatkan keterampilan dengan metode bermain peran, praktik dan pelatihan tata boga, tata rias, dan lain sebagainya (Sofiana Eri, 2020).

Sekoper Cinta juga memberikan pengetahuan mengenai keterampilan, mengasah keterampilan peserta dengan pemberian materi modul terampil juga pelatihan-pelatihan, diantaranya tata rias, *e-commerce*, pelatihan teknologi informasi, menjahit, manajemen usaha jasa boga. Rangkaian kegiatan yang dilakukan di Sekoper Cinta yang merupakan sebuah wadah tempat berkumpulnya perempuan-perempuan di lingkup Jawa Barat saling bertukar ilmu dan pengalaman ternyata cukup efektif. Adanya *sharing session* membuka pemikiran para peserta Sekoper Cinta untuk terus maju dan berkembang (Nurlatifah et al., 2020).

Program Sekoper Cinta dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak-pihak untuk terselenggara dengan baik dan lancar. Pihak-pihak ini adalah yang membantu dalam pemberdayaan perempuan, tentunya Sekoper Cinta berkolaborasi dengan pihak-pihak lain sesuai dengan tujuan Sekoper Cinta dan untuk kepentingan menciptakan perempuan yang mandiri dan berkualitas.

Lima unsur Pentahelix yang terlibat dalam program Sekoper Cinta tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergi dan kolaborasi diperlukan untuk menyukseskan program tersebut. Kolaborasi Pentahelix memiliki peran penting dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan Pentahelix berkontribusi pada kemajuan sosial ekonomi kawasan. Tujuan dilaksanakannya program Sekoper Cinta dapat terwujud apabila berbagai elemen Pentahelix yang terlibat dalam program ini dapat saling bekerjasama. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan perempuan di Jawa Barat berupa kolaborasi. Dalam pelaksanaan program Sekoper Cinta, pemerintah dalam hal ini DP3AKB tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan stakeholders yang terdiri dari unsur OPD (Organisasi Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat dan Media (Praratya et al., 2021).

Program Sekoper Cinta sebagai jembatan untuk membantu perempuan menjadi mandiri berdaya guna dan berhasil guna. Program Sekoper Cinta ini bertujuan untuk menghasilkan perempuan-perempuan yang berkualitas sehingga menghasilkan keluarga-keluarga yang berkualitas dan sejahtera.